



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR :170/16 /DPRD/2017**

**TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2018**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang diwakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah Menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017);
  - c. Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/Legislati/DPRD/2017 dan Nomor :188/141-Huk, tanggal 17 November 2017 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Diwakili Oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tangerang Selatan Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Yang Diwakili Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018**

**KEDUA** : **Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;**

**KETIGA**

**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di : Tangerang Selatan**  
**Pada Tanggal :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**



**MOCH RAMLIE. MA**

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor : 170 / 16 / DPRD / 2017

Tanggal : 20 November 2017

Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL / TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DIBERTABI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KEPE-RANGAN
				HARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peraturan Daerah	Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;	Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penanggulangan HIV dan AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS, Peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana	√	-	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka HIV dan AIDS			Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan	Tahapan I	
2	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031	Evaluasi materi teknis RTRW, Kesesuaian peta terhadap pola ruang dan struktur ruang, Kesesuaian peta terhadap pola ruang dan struktur ruang, Peninjauan kembali BKPRD Provinsi	-	√	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahapan I	
3	Peraturan Daerah	Ketahanan Pangan Dan Gizi	Pengadaan, Pengelolaan dan Pendistribusian	√	-	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi			Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan	Tahapan I	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKAAN DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KEPERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Per/Kot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota					
4	Peraturan Daerah	Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan	Pengaturan Tata Cara serta Mekanisme Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan			Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan	Tahapan I	
5	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kepemudaan	Pengaturan dalam penyelenggaraan kepemudaan seperti peran, tanggung jawab dan Hak Kepemudaan, pemberdayaan, pengembang terhadap kepemudaan	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan			Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahapan II	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTABI		PEMRAKARBA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KIRI BANGKAL
				BARU	UBAH		HA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perubahan pada kewenangan pengelolaan panti yang dilimpahkan ke Provinsi Banten	-	√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahapan II	
7	Peraturan Daerah	Pelestarian Kebudayaan Betawi Kota Tangerang Selatan;	Pengaturan tentang bagaimana nilai tradisi dan adat istiadat serta pakaian betawi, pembiayaan oleh Pemkot dalam melestarikan budaya betawi	√	-	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembang Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat			Gabungan Komisi DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan II	
8	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ke Provinsi Banten	-	√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tahapan II	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DIBERTASI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PERTAMPALAN	KETAHANAN
				BARU	UBAH		HA	Per/Kot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan	Prinsip Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, PPDB dan Sistem Pendidikan Dasar, SD, MI Ke jenjang Sekolah Menengah Pertama	-	√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tahapan III	
10	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;	berkaitan dengan usaha pariwisata yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata	-	√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata</li> </ol>			Dinas Pariwisata	Tahapan III	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKARMA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMPALAN	KEPELANGKAPAN
				BARU	UBAH		NA	Per/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3. Peraturan Menteri Parawisata Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Parawisata					
11	Peraturan Daerah	Pelayanan Publik	Ketersediaan Pelayanan Publik dan Transparansi Informasi bagi Masyarakat	√	-	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahapan III	
12	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	-	-	√	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahapan III	
13	Peraturan Daerah	Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dalam rangka memperhatikan bagi penyandang disabilitas	√	-	1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia  2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas			Gabungan Komisi DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan IV	



NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMERAKA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETAHAPAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Peraturan Daerah	Pembangunan Budaya Integritas	Pemerintahan Daerah yang bersih	√	-	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi			Gabungan Komisi DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan IV	
15	Peraturan Daerah	Ketahanan Keluarga		√	-	1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga			Gabungan Komisi DPRD Kota Tangerang Selatan	Tahapan IV	
16	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	Pelaksanaan Anggaran 2017	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTASI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Ringkasan Perubahan APBD, Rincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja, Daftar Jumlah Pegawai, Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali serta daftar pinjaman daerah	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	
18	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi Belanja, Daftar Jumlah Pegawai, Daftar Piutang Daerah, Daftar Penyertaan Modal, dan lain-lain	√	-	1. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN



MOCH RAMLIE. MA